

**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG  
BERPENGARUH TERHADAP REALISASI  
BELANJA MODAL (STUDI PADA  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2007-2010)**

**Siti Arifah, Chaidir Iswanaji, dan Nuwun Priyono**  
*Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research to determine the factors that influence the realization of capital expenditure in the District / Municipality in Central Java Period 2007-2010. The variables that our analysis is Economic Growth (PE), Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing (DBH) and Capital Expenditure (BM). The research method used is a causality study assisted with SPSS software version 16.0. The research took 31 samples of the District / Municipality in Central Java. The data used are secondary data. While the determination of the sample by using convenience sampling. The results showed that the Economic Growth (PE), Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Revenue Sharing (DBH) simultaneously affect the realization of the capital expenditure. While partial test by t test showed only variable General Allocation Fund (DAU) that partially affect the realization of capital expenditure. And other variables are not partial effect on capital expenditures regencies / cities in Central Java*

**Keywords :** *Economic Growth, PAD, DAU, DAK, Revenue Sharing (DBH), Capital Expenditure*

## A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan otonomi daerah di Indonesia diberlakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dasar pemikiran yang ditetapkan dalam undang-undang ini adalah: pertama, sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; kedua, prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dimaksudkan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Mahsun, *et.al.*, 2006).

Pemerintah daerah otonom memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu: Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan setara maksudnya kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi. Sedangkan hubungan kemitraan

bermakna bahwa pemerintah daerah dan DPRD sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing (Mahsun, *et.al.*, 2006). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim dan Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan otoritas pemerintah daerah, pemerintah pusat akan melakukan transfer sejumlah dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil yang terdiri atas pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan yang lain berupa Pendapatan Asli Daerah.

Sumber penerimaan dari PAD ini seharusnya merupakan tumpuan bagi daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah diharapkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah terbesar. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu pemerintah daerah mampu terlepas dari ketergantungan sejumlah transfer dana perimbangan dari pusat. Ini berarti sudah seharusnya pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangannya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk dalam pengeluaran belanja modal. Pengeluaran belanja modal merupakan salah satu pos pengeluaran APBD yang besar, sehingga pos pengeluaran ini menjadi penting, terutama bisa dianggap sebagai pos pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kepentingan

masyarakat daerah. Pengeluaran belanja modal ini dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebagai akibat dari adanya desentralisasi fiskal. Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang dimanfaatkan (Kuncoro, 1997; Arsyad, 1999; Todaro, 2000).

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Hasil penelitian yang dilakukan Oates (1995) serta Lin dan Liu, (2000), seperti yang dikemukakan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan desentralisasi fiskal

memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan. Sedangkan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan pula bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dengan demikian bahwa desentralisasi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik.

Penelitian ini akan menguji apakah Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap realisasi belanja modal dengan objek penelitian pada Pemerintah Kota/ Pemerintah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Kontribusi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam rangka pengambilan kebijakan berkaitan dengan pengalokasian belanja modal.

## **B. TINJAUAN PUSAKA**

### **1. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya

menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Situngkir, 2009).

Sedangkan definisi aset tetap menurut PP No. 71 Tahun 2010, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemudian belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Mardiasmo, 2002).

## **2. Peranan Anggaran Daerah Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Rubin (1993), menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi dimana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda. Sedangkan menurut Samuels dalam Darwanto (2007), penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai

produk hukum. Kemudian menurut Von Hagen (2002), penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning, legislative approval, executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agen.

Mahmudi (2011), mengungkapkan bahwa anggaran merupakan rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa mendatang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus / defisit, pembiayaan serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan. Peran anggaran sektor publik dapat dilihat dari aspek makro dan aspek mikro. Aspek makro dimaksud adalah peran anggaran dalam tatanan makro ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Dalam hal ini anggaran berperan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yaitu melakukan alokasi, distribusi dan stabilisasi. Sedangkan aspek mikro adalah peran anggaran dalam suatu organisasi yang dilihat dari sudut pandang manajerial organisasi. Peran anggaran dari aspek mikro ini antara lain: sebagai alat perencanaan, pengendalian, koordinasi dan komunikasi, penilaian kinerja dan alat motivasi.

### **3. Penyusunan APBD di Indonesia**

Otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 1999, membawa perubahan yang besar termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai daerah otonom diberikan kekuasaan yang cukup besar untuk mengatur dan

mengelola sumber daya keuangan. Pemberian kekuasaan terhadap daerah ini, tentunya dibarengi dengan tanggungjawab yang besar bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pengelolaan sumber daya keuangan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas tersebut juga pada proses penyusunan APBD. Penyusunan APBD harus efektif dan tepat sasaran, serta berorientasi pada kepentingan publik.

*Performance* budget atau anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan atau program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut (Mahmudi, 2011). Pemerintah Indonesia mengadopsi sistem penganggaran dengan menggunakan anggaran kinerja dalam perencanaan APBN dan APBD termasuk perencanaan anggaran Kementerian/ Lembaga dan anggaran SKPD di pemerintah daerah, yang telah dimulai sejak era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tanggal 1 Januari 2001.

Menurut Tanjung (2006), berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat prosedur penyusunan APBD untuk Kabupaten/Kota, prosedur dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun



dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan RKPD, kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berpedoman kepada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Rancangan KUA ini disampaikan kepada DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. Setelah KUA disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD, kemudian kepala daerah menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran (Rancangan PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD. Setelah itu, SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA SKPD yang telah dibahas oleh tim anggaran, akan menjadi dasar dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD. Rancangan perda APBD ini oleh kepala daerah disampaikan kepada DPRD untuk bersama-sama dilakukan pengambilan keputusan menjadi peraturan daerah APBD.

#### **4. Penelitian-Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan mengambil sampel Kabupaten/Kota se- Jawa Bali, menemukan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU

berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan.

Penelitian lain dilakukan oleh Situngkir (2009) yang meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dan secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan dengan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh alokasi belanja modal yang signifikan.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

## **2. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten atau kota di Propinsi Jawa Tengah. Terdapat 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *convenience sampling*. Sampel penelitian ini 31 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dalam teknik ini sampel yang dipilih sebagai subyek, yang paling mudah diakses (Sekaran, 1992). Alasan pemilihan sampel ini adalah karena adanya keterbatasan dalam ketersediaan data penelitian.

## **3. Data Penelitian**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan periode pengamatan data tahun 2007-2010.

## **4. Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan variabel dependennya adalah belanja modal. Variabel selain pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam nilai rupiah, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam persentase.

## **5. Hipotesis Penelitian**

Terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi

Jawa Tengah.

Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Terdapat pengaruh simultan Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

## 6. Model Penelitian

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan model regresi linear. Persamaan regresi linier berganda dalam model penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan *soft ware* pengolahan data SPSS versi 16. Sebelum dilakukan pengujian terhadap regresi linier berganda tersebut dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial maupun simultan.

Persamaan regresi linear:

$$Y = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + \beta_5 DBH + e$$

dimana :

- Y = Belanja Modal (BM)  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta$  = Slope atau koefisien regresi atau intersep  
PE = Pertumbuhan Ekonomi  
PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)  
DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)  
DBH = Dana Bagi Hasil  
E = error

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam analisis deskriptif ini, data penelitian akan dijelaskan secara deskriptifnya. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Tabel 1. menyajikan hasil dari pengujian statistik deskriptif. Berdasarkan tabel tersebut variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2007-2010 memiliki angka terendah sebesar 2 persen dan tertinggi sebesar 6 persen. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (PE) dari 124 responden menunjukkan angka 4,79 persen dan standar deviasi sebesar 0,7 persen.

Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan

nilai terendah sebesar Rp 25,73 Milyar dan nilai tertinggi pada angka Rp 327,99 Milyar. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai terendah Rp 212,61 Milyar dan nilai tertinggi pada angka Rp 793,26 Milyar, dengan standar deviasi sebesar Rp 137,03 Milyar. Data penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah pada periode Tahun 2007-2010 menunjukkan nilai terendah Rp 8,5 Milyar dan nilai tertinggi Rp 100,91 Milyar. Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan nilai terendah pada angka Rp 15,4 Milyar dan nilai tertinggi Rp 308,1 Milyar. Dan terakhir, Belanja Modal (BM) selama periode tahun 2007-2010 menunjukkan nilai terendah sebesar Rp 25,47 Milyar dan nilai tertinggi sebesar Rp 323,3 Milyar dengan standar Rp 48,72 Milyar.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	124	.02	.06	.0479	.00787
PAD	124	25737	327992	7.12E4	45737.014
DAU	124	212614	793267	4.96E5	137033.649
DAK	124	8500	100912	4.96E4	19158.736
DBH	124	15408	308100	4.82E4	44757.642
BM	124	25479	323356	1.20E5	48723.634
Valid N (listwise)	124				

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, model regresi linier tidak ditemukan masalah dalam normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedasitas. Dengan hasil pengujian asumsi klasik tersebut

berarti model regresi linier layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut yaitu pengujian secara simultan dan parsial. Pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F, sedangkan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t.

Adapun hasil output regresi linier berganda menggunakan SPSS versi. 16 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.461	.212	.179	44152.7096	1.191

### 3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dalam tabel 2. diatas menunjukkan besarnya adjusted  $R^2$  adalah 0,179 atau 17,9%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen (Belanja Modal) dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU,DAK dan Dana Bagi Hasil sebesar 17,9%, sedangkan sebesar 82,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain kelima variabel independen tersebut.

### 4. Pengujian Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual /parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol,

atau:  $H_0: b_i = 0$

Hipotesis alternatifnya ( $H_A$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:  $H_A: b_i \neq 0$

**Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	87526.359	30766.801		2.845	.005
	PE	-466688.846	558228.521	-.075	-.836	.405
	PAD	-.025	.191	-.023	-.130	.897
	DAU	.130	.037	.367	3.498	.001
	DAK	-.419	.250	-.165	-1.674	.097
	DBH	.273	.180	.251	1.513	.133

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa hanya variabel DAU yang secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (BM), karena signifikan 0,01 atau jauh dibawah 0,05 atau 5%. Sedangkan variabel lainnya (Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAK dan dana bagi hasil) secara parsial atau individual tidak berpengaruh ke Belanja Modal (BM).

### 5. Pengujian Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:



Ho:  $b_1=b_2=.....=b_k=0$

Hipotesis alternatifnya (HA) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:  $HA: b_1 \neq b_2 \neq ..... \neq b_k \neq 0$

**Tabel 4. Anova (Uji Signifikansi F)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.196E10	5	1.239E10	6.357	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.300E11	118	1.949E9		
	Total	2.920E11	123			

Hasil Anova menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,357 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 atau dibawah 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal (BM) atau dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE), PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara bersama – sama berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).

## 6. Pembahasan

Pengujian pertama yang dilakukan adalah pengujian parsial dengan menggunakan uji t dilakukan terhadap variabel independen, apakah berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Uji signifikansi t yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya variabel DAU yang secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Modal), karena signifikan 0,01 atau jauh dibawah 0,05 atau 5%. Ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menunjukkan ada pengaruh DAU terhadap realisasi anggaran belanja modal pada

pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diterima. Sedangkan hipotesis selain hipotesis tersebut ditolak, karena variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), PAD, DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal (BM) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Hasil pengujian parsial (uji t) tersebut menunjukkan bahwa hanya variabel DAU yang berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal (BM). Ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagian digunakan untuk belanja modal. Tujuan utama dari transfer Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan hanya DAU yang berpengaruh secara parsial terhadap realisasi belanja modal menunjukkan bahwa DAU dapat memenuhi tujuan utamanya.

Apabila dilihat dari nilai rupiah dari DAU yang ditransfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah, data sampel penelitian menunjukkan bahwa lebih dari Rp 61,5 triliun, DAU ditransfer selama periode Tahun 2007-2010. Melihat besarnya nilai DAU, bila dibandingkan dengan variabel yang lain seperti: PAD, DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH), menunjukkan bahwa nilai DAU paling besar. Sehingga sangat logis jika Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap realisasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Hasil pengujian parsial ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa salah satu variabel independen yaitu: DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel anggaran belanja modal. Kemudian hasil uji parsial yang lain yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi

(PE) tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal, juga mendukung hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007). Hasil uji parsial lainnya menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007).

Kemudian pengujian yang kedua adalah pengujian simultan. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,357 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 atau  $\leq 5\%$ , maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal (BM) atau dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE), PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara bersama – sama berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap realisasi belanja modal dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa secara simultan Pertumbuhan ekonomi/PDRB, PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

## E. PENUTUP

### Simpulan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,498 dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,001, yang berarti bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkatkan belanja modal. Sementara Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAK dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara parsial terhadap realisasi anggaran belanja modal. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara simultan

Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 6,357 dengan probabilitas 0,000.

### Saran

Perlu peningkatan PAD di pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah sehingga kemampuan pemerintah dalam merealisasikan/mengalokasikan anggaran belanja modal dapat meningkat.

Perlu peningkatan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki kemampuan yang lebih dalam membelanjakan anggaran belanja modal.

Penelitian ini menggunakan sampel kabupaten. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih sempurna lagi tentang realisasi/pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi dengan melihat nilai PDRB, dalam penelitian ini menggunakan data PDRB non migas, diharapkan dalam penelitian yang akan datang menggunakan data PDRB dengan migas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Edisi IV. Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Disertasi S3. Tidak Dipublikasikan. Msi - FE UGM.

- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK STIE YO. 127-146. Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1): 53-64.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Lin, Justin Yifu and Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*, Economic Development and Cultural Change Chicago. 49: 1-21.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., dan HA Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Edisi ke-2. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Oates, Wallace E. 1995. *Comment on "Conflict and Dillemas of*

- Decentralization” by Rudolf Holmes. The World Bank Research Observer. 351-353.*
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc. Second edition.
- Samuels, David. 2000. *Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary “checks and balances” in presidential systems*. University of Minnesota, working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*, Second Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemkot/Pemkab Sumatera Utara*. Tesis S2. Magister Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2006. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Alfabeta. Bandung.

Todaro, Michael P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi 7. terjemahan. Erlangga. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33/2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Von Hagen, Jurgen. 2002. *Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance*. The Economic and Social review 33(3): 263-284.